



## Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power

Dinda Tulus Tiara<sup>1\*</sup>, Syasya Yuania Fadila Mas'udi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, 65144, Malang-Indonesia

### Info Artikel

Dikirim: Des 18, 2022

Diterima: Jan 16, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

### Kata Kunci:

Diplomacy; Soft Power;  
World Peace;

### Koresponden:

Dinda Tulus Tiara

Program Studi Hubungan  
Internasional, Universitas  
Muhammadiyah Malang

### Email:

dindatulustiara@webmail.umm.  
ac.id

### Sitasi Cantuman:

Tiara, D. T., & Mas'udi, S. Y. F. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*. 4(2); 74-88. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

**Abstract** The Russia-Ukraine conflict has a negative impact on global stability, thus triggering crises in various countries. Conflict conditions that have not subsided, making Indonesia take the initiative to carry out a peace mission through President Joko Widodo who visited Ukraine and Russia, to become a communication bridge between the two countries. This study aims to explain the reasons why Indonesia carried out a peace mission against the Russia-Ukraine conflict. The research used a qualitative explanatory method, with library research data collection techniques, as well as qualitative analysis techniques. Besides that, it also uses Soft Power Theory, and the Concept of First Track Diplomacy. The results obtained were that Indonesia used first-track diplomacy instruments in the Russian-Ukrainian conflict peace mission, which can be seen from the use of dialogue, negotiation and cooperation between countries, thereby opening up opportunities for peace between countries. In addition, behind the peace mission, Indonesia has economic interests, forms a positive image, and prepares to launch the agenda for the upcoming G20 summit. This phenomenon is in line with the goal of Soft Power Indonesia, which is to improve the security of the external environment by projecting a peaceful and attractive image of the country by using its Soft Resources as Host & Chair of the G20 Summit. This study builds on previous studies, because the results obtained enrich the study of the development of the Russia-Ukraine conflict, especially when viewed from the perspective of soft power.

**Abstrak** Konflik Rusia – Ukraina memberikan dampak negatif terhadap stabilitas global, sehingga memicu krisis di berbagai negara. Kondisi konflik yang belum mereda, membuat Indonesia berinisiatif melakukan misi perdamaian melalui Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, untuk menjadi jembatan komunikasi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia melakukan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina. Penelitian menggunakan metode eksplanatif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, serta teknik analisis kualitatif. Selain itu juga memakai Teori Soft Power, dan Konsep First Track Diplomacy. Hasil yang didapatkan yaitu Indonesia memakai instrumen diplomasi first track dalam misi perdamaian konflik Rusia – Ukraina, yang terlihat dari penggunaan dialog, negosiasi, dan kerja sama antar negara, sehingga membuka peluang perdamaian antar negara. Selain itu, dibalik misi perdamaian tersebut, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi, membentuk citra positif, dan mempersiapkan untuk melancarkan agenda KTT G20 mendatang. Fenomena tersebut kemudian bersesuaian dengan tujuan dari Soft Power Indonesia yaitu untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik dengan menggunakan *Soft Resource* nya sebagai Tuan Rumah & Ketua Penyelenggaraan KTT G20. Studi ini mengembangkan studi sebelumnya, karena hasil yang didapatkan memperkaya kajian tentang perkembangan konflik rusia - ukarina terutama jika ditinjau dari segi *soft power*.

### Tentang:

Dinda Tulus Tiara, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

Syasya Yuania Fadila Mas'udi, menyelesaikan Studi S-2 di The Australian National University, Master of Strategic Studies pada tahun 2017-2018. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

---

**PENDAHULUAN**

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada akhir Februari 2022 lalu merupakan sebuah fenomena global yang memiliki kompleksitas dampak baik dari sisi politik, ekonomi, hingga keamanan global. Rusia secara mengejutkan memutuskan untuk melakukan ‘operasi militer khusus’ dengan dalih ‘untuk melindungi etnis Rusia di Donbass dan Luhansk dari ancaman dan persekusi rezim Kiev’. Intervensi tersebut menyebabkan perang berkepanjangan pada saat tulisan ini ditulis, dimana Ukraina sendiri memperoleh bantuan militer dari NATO yang membuat konflik ini belum menemukan titik terangnya (Mankoff, 2022). Konflik ini kemudian membawa tantangan baru dalam dunia internasional.

Adanya adu retorika diantara kedua pihak membuat resolusi konflik melalui jalur diplomasi masih jauh dari kata tercapai. Rusia mengklaim bahwasanya Ukraina—yang didukung oleh NATO memiliki motif untuk melakukan ekspansi aliansi tersebut agar semakin menuju ke arah timur dan mengancam untuk melemahkan eksistensi negara tersebut. Sedangkan Ukraina dan NATO sendiri membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kepada sebuah negara yang independen (Falahi, 2022). Terlebih dengan adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS dan NATO, dan juga tudingan negatif oleh beberapa kepala negara dari blok tersebut membuat peluang akan negosiasi perdamaian semakin menipis. Selain itu baik Rusia dan Ukraina masih memiliki harapan bahwa konflik tersebut masih realistis untuk dimenangkan, yang membuat perang tidak akan selesai dalam waktu dekat (Sweijs & Bertolini, 2022).

Konflik Rusia – Ukraina memberikan dampak negatif ke negara-negara lain, seperti pada bidang energi, pupuk, dan *supply chain*. Pada bidang energi, terjadinya kelangkaan energi di Uni Eropa, karena Rusia merupakan salah satu eksportir terbesar komoditas energi seperti minyak, gas, dan batu bara, yang mana sekarang dilarang perdagangannya karena sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Kemudian, komoditas pupuk juga mengalami kelangkaan yang mana mempengaruhi 20% perdagangan pupuk internasional, sehingga menciptakan kekurangan pupuk di berbagai negara (Primadhyta, 2022). Berbagai kondisi ini mendisrupsi *supply chain* mencakup peredaran makanan, bahan baku, dan elektronik, terutama *food chain* karena Rusia dan Ukraina mencakup 1/3 produksi gandum dunia, dan 75% minyak bunga matahari (Primadhyta, 2022). Berbagai krisis ini terus berlanjut hingga sekarang, karena konflik yang belum menemukan titik terang.

Oleh sebab itu Indonesia merasa terpanggil untuk turut berpartisipasi dalam mendamaikan kedua negara tersebut. Hal tersebut dirasa merugikan seluruh pihak dan berdampak baik secara material (ekonomi, sosial, keamanan) maupun immaterial (politik dan kemanusiaan). Pada tanggal 29 Juni 2022 Presiden Joko Widodo bertolak ke Ukraina dalam rangka menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky (Pebrianto, 2022). Kedatangan Presiden Joko Widodo adalah bentuk manifestasi dari kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Secara simbolis kunjungan Presiden RI ke Ukraina merupakan sebuah perwujudan dari bentuk rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia untuk Ukraina (CNN Indonesia, 2022). Hal tersebut dikarenakan perwakilan negara seperti Presiden, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain, yang datang/berkunjung ke negara lain, dalam diplomasi merupakan simbol representasi negara dan masyarakatnya itu sendiri, sehingga juga membawa citra negaranya di tingkat internasional (Stanzel, 2018). Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sebagai aktor diplomasi dan representasi dari Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi tentang nilai kedaulatan dan integrasi wilayah. Indonesia menganggap bahwa pengawalan terhadap spirit perdamaian dan resolusi secara damai adalah hal yang penting dan tidak boleh luntur. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo kemudian menawarkan diri kepada Presiden Zelensky untuk menjadi ‘pengantar pesan’ kepada Presiden Putin (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022a).

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo tiba di Moskow Rusia bersama rombongan. Kunjungan Presiden RI ke Rusia adalah upaya dalam mewujudkan

amanat konstitusi Indonesia dalam berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin sesuai dengan janji yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ukraina. Dalam hal ini, Indonesia bertekad dan bersedia untuk menjadi jembatan penghubung antara komunikasi kedua negara. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kekhawatirannya kepada Presiden Putin akan rantai pasok makanan yang terganggu akibat adanya perang ini. Oleh karena itu diharapkan konflik yang berakibat buruk terhadap kemanusiaan ini agar dapat segera menemukan jalan tengahnya (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Pembahasan mengenai Konflik Rusia-Ukraina dan peran Indonesia dalam menghadapi fenomena tersebut telah dijelaskan melalui beberapa studi terdahulu. Nagy dan Kim menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rusia memiliki konsekuensi global, yakni mengenai adanya upaya untuk mengubah tatanan dunia yang berorientasikan pada Westernisasi menjadi sebuah sistem yang multipolar dengan Rusia dan Tiongkok sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuatan Barat (Nagy & Kim, 2022). Kemudian, Mbah dan Wasum menerangkan bahwa rangkaian sanksi ekonomi yang diterapkan menyebabkan inflasi dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan krisis energi beserta pangan (Mbah & Wasum, 2022). Hal tersebut juga mempengaruhi kondisi domestik Indonesia dimana terjadi kenaikan harga terhadap komoditas energi, dan juga berdampak pada adanya peningkatan beban subsidi negara (Junaedi, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mendapatkan suatu pola anomali yang mana Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki *power* sebesar negara-negara maju (Amerika Serikat, Tiongkok, dll) tetapi Indonesia berani melakukan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina. Terlebih lagi, Indonesia melakukan misi tersebut di luar kawasannya yaitu Asia Tenggara yang mana terdapat ASEAN, sedangkan Indonesia jarang terlibat langsung dalam resolusi konflik di luar Asia Tenggara. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengetahui alasan Indonesia melakukan misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana akan mengarah kepada kepentingan sebenarnya dari Indonesia. Selain itu, menjadi menarik untuk mendalami kepentingan serta motif dibalik pendekatan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon konflik tersebut. Sehingga terbentuklah satu rumusan masalah yakni “Mengapa Indonesia mengupayakan misi perdamaian terhadap konflik Rusia - Ukraina?”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan misi perdamaian Indonesia terhadap konflik Rusia - Ukraina.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif. Secara definisi, penelitian eksplanatif dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi terhadap fenomena yang sedang diamati dan berusaha menjelaskan mengapa fenomena terjadi dan apa pengaruhnya (Bungin, 2010). Penelitian ini menggunakan unit analisis tingkat negara-bangsa dalam memandang topik yang diangkat, dengan level korelasional yakni menempatkan Indonesia sejajar dengan Rusia dan Ukraina sebagai unit pembahasan. Pola deduktif digunakan dalam menganalisis fenomena yang dikaji pada penelitian ini, sehingga memberikan visualisasi terhadap peristiwa yang terjadi. Data yang dikumpulkan akan dianalisa dengan cara kualitatif, yaitu analisis non statistik yang berupa tabel, gambar, ataupun grafik yang kemudian diolah menjadi sebuah bentuk paragraf (Mas'ood, 1990). Kemudian, pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan cenderung bersifat sekunder, dengan data yang disajikan diperoleh melalui beberapa sumber literatur elektronik, seperti buku, artikel jurnal, surat kabar, *press release*, dokumen kenegaraan resmi, website berita, dan website kementerian dari negara-negara terkait. Terakhir, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana analisis berbentuk penjelasan kualitatif dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data, pengelompokan data, pengelolaan data, hingga pada penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah.

---

**TINJAUAN PUSTAKA****Teori *Soft Power***

Penelitian ini menggunakan Teori *Soft Power* yang mana akan berfungsi menjelaskan kepentingan Indonesia dalam misi perdamaian terhadap konflik Rusia-Ukraina. *Soft Power* menurut Geun Lee merupakan kemampuan negara untuk mengelola *soft resources* (ide, simbol, budaya, tradisi, image, dll), sehingga dapat mempengaruhi pihak lain baik bersifat kooperatif maupun koersif (Nucterlain, 1976; Lee, 2009). Selain bertujuan memenuhi kepentingan nasional, *soft power* juga memiliki tujuan utama yaitu untuk menjadi ‘menarik (*attractive*)’ di panggung internasional. Lebih lanjut Geun Lee membagi tipe *soft power* berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) *Soft power* untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik; (2) *Soft power* untuk memobilisasi dukungan negara lain untuk kebijakan luar negeri dan keamanan seseorang (3) *Soft power* untuk memanipulasi cara berpikir dan preferensi negara lain (4) *Soft power* untuk menjaga kesatuan komunitas atau komunitas negara (5) *Soft power* untuk meningkatkan peringkat persetujuan dari seorang pemimpin atau dukungan domestik pemerintah (Nucterlain, 1976; Lee, 2009). Teori ini menjadi tepat digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan alasan Indonesia melakukan misi perdamaian dunia ke Rusia dan Ukraina, baik kepentingan nasional maupun membentuk citra positif Indonesia di mata dunia. Penggunaan teori ini juga menjadi pembeda (*novelty*) dengan penelitian lainnya yang menggunakan teori-teori ekonomi politik internasional, tanpa menghiraukan analisis pada aspek immaterial yang diperjuangkan Indonesia dalam hal ini yaitu *soft power*. Dengan menggunakan Teori ini juga, penulis dapat menarik sebuah argumen tentang bagaimana cara Indonesia dalam membentuk *Soft Power*nya sehingga nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada permasalahan konflik Rusia-Ukraina.

**Konsep *First Track Diplomacy***

Penelitian ini juga menggunakan *First Track Diplomacy* sebagai pendekatan tambahan yang berfungsi untuk menggambarkan upaya misi perdamaian Indonesia dalam merespon konflik Rusia - Ukraina. *Track / jalur* ini kerap dianggap sebagai ‘diplomasi tradisional’ yang berfokus pada penyelesaian konflik melalui jalur dialog antar kepala negara / pejabat pemerintahan, sehingga jalur ini mengedepankan perspektif *nation-centric* (Wehrenfennig, 2008). Kelebihan dari *track* ini adalah negara dapat memainkan instrumen politik sebagai kekuatan untuk dapat mempengaruhi luaran dari proses negosiasi (Mapendere, 2016). Selain itu negara dapat menggunakan berbagai macam kekuatan material dan finansial mereka untuk meningkatkan posisi *leverage* mereka dalam proses dialog (Bercovitch & Langley, 1993). Namun kekurangan dari *track* ini adalah proses dialog dan perdamaian dapat menjadi tidak efektif oleh aspek *power* yang terkadang dapat membuat negara mengabaikan hasil perjanjian akibat ‘terlena’ oleh kekuasaan (Diamond & McDonald, 1996). Dalam konteks penelitian, Indonesia berusaha untuk menjalin diplomasi dengan melakukan kunjungan resmi kepada Rusia dan Ukraina untuk meredakan ketegangan sekaligus mendorong kedua negara untuk titik terang dari permasalahan yang ada. Konsep *first track diplomacy* ini juga menambah *novelty* penelitian, yang mana membantu penjelasan pembentukan *soft power* oleh aktor misi perdamaian dunia Indonesia, sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menitikberatkan analisis secara sistem interasional.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Misi Perdamaian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Perang Rusia-Ukraina**

Berangkat dari UUD 1945 yang termaktub di dalamnya untuk turut menciptakan perdamaian dunia dan turut menjaga ketertiban dunia, dalam konteks krisis Rusia – Ukraina adalah hal krusial bagi Indonesia. Hal tersebut untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam konstitusi. Sejalan dengan kenyataan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian ini adalah untuk mengawal

isu kemanusiaan. Menurut Moerdijat, krisis Rusia – Ukraina harus segera menemukan jalan keluarnya. Mengingat, krisis yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap berbagai tatanan geopolitik maupun geostrategis di dunia. Tidak dapat dipungkiri, krisis Rusia – Ukraina juga akan sangat berdampak pada sektor energi dan sektor ketahanan pangan (Moerdijat, 2022).

Baik Ukraina maupun Rusia secara cepat atau lambat akan merasakan dampak perang khususnya pada komoditas ekonomi yang cukup signifikan. Pasalnya kedua negara memiliki signifikansi terhadap rantai pasokan komoditas tersebut. Seperti misalnya Rusia yang diketahui sebagai negara pemasok bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, dan batu bara) dan kedua negara (Rusia – Ukraina) sebagai penyumbang seperempat dari komoditas non bahan bakar fosil dalam bentuk logam seperti ekspor global besi dan produk setengah jadi baja non-paduan, serta ekspor besi kasar dunia. Dengan tidak mempertimbangkan alternatif energi pengganti tersebut maka secara agregat penghentian dari Rusia akan menyebabkan output sektor manufaktur dan jasa – jasa negara OECD sehingga berkurang antara 2,75% - 3% (Fadel, 2022).

Tidak hanya pada sektor migas, krisis ini juga turut berimbas pada sektor pangan. Banyak pengamat mengatakan bahwa terdapat peluang akan timbulnya krisis pangan dunia (Ben Hassen & El Bilali, 2022; Buddhavarapu, 2022;). Hal tersebut dikarenakan banyak negara yang memiliki ketergantungan bahan makanan pokok pada kedua negara yang bertikai. Salah satu komoditas bahan makanan pokok yang terdampak adalah gandum. Negara – negara seperti Armenia dan sekitarnya memiliki ketergantungan impor gandum terhadap Rusia – Ukraina hampir 99%. Tidak hanya berdampak pada negara tetangga saja, Timur – Tengah dan Afrika juga turut merasakan hal serupa. Sudan mengimpor gandum dari Rusia – Ukraina hampir 93% dari total impor komoditas tersebut. Negara – negara lain secara berurut juga mengimpor gandum dengan persentase; Lebanon 92,6%, Mesir 86%, Libya 65%, Tunisia 61,7%, Oman 58,3%, Namibia 52,2%, dan Yaman 51%. Krisis tersebut memberikan dampak langsung terhadap kegiatan impor negara – negara yang telah disebutkan (Fadel, 2022).

Dalam konteks keterlibatan Indonesia untuk menengahi krisis tersebut, banyak pihak yang skeptis dengan upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya kesempatan pertemuan KTT G7 di Jerman, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melanjutkan perjalanannya menuju Ukraina dan Rusia sebagai bentuk dalam mewujudkan misi perdamaian yang dibawa oleh Indonesia. Namun ternyata hal tersebut kemudian banyak menghasilkan nada – nada minor. Beberapa pengamat di Indonesia beranggapan bahwa Indonesia sejatinya tidak memiliki leverage power atau dapat dikatakan pengaruh kekuatan untuk menekan Rusia dan Ukraina agar segera berdamai (Wibowo, 2022).

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo juga kerap membangun komunikasi antara kedua negara yang bertikai. Pada tanggal 27 April 2022 pukul 15.00 WIB Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi dengan Presiden Ukraina menggunakan via telepon. Perbincangan tersebut berisikan tentang kabar dari kondisi terkini lapangan yang diberitahukan oleh Presiden Zelensky. Pada perbincangan telepon tersebut Presiden Ukraina juga membahas berbagai permintaan bantuan khususnya persenjataan kepada Indonesia. Presiden Joko Widodo membalas dengan menolak secara halus bahwa amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia menentang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia siap dalam memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan. Sebelum menutup telepon Presiden Joko Widodo juga tidak lupa mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 di Bali nanti. (Humas Kemensetneg, 2022).

Setelah menghubungi Presiden Ukraina, Presiden Joko Widodo kemudian menghubungi Presiden Putin pada tanggal 28 April 2022. Sama halnya dengan perbincangan yang dilakukan oleh Presiden Zelensky, Presiden Putin juga memberikan update kabar terkini

di Ukraina menurut versinya. Presiden Putin juga mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua belah pihak juga terus berjalan. Presiden Joko Widodo berharap besar kepada Presiden Putin untuk dapat segera mengakhiri perang. Sembari membicarakan hal tersebut tak lupa Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada Presiden Rusia untuk hadir pada KTT G20 di bulan November dan Presiden Putin menyatakan akan hadir pada acara tersebut. Indonesia siap berkontribusi penuh dalam upaya mendamaikan perang Rusia – Ukraina (Humas Kemensetneg, 2022).

### Diplomasi Indonesia ke Ukraina

Indonesia melakukan diplomasi ke Ukraina melalui cara kunjungan diplomatik, pembentukan dan penguatan kerja sama, serta negosiasi resolusi konflik. Kunjungan diplomatik Indonesia ke Ukraina berlangsung pada tanggal 29 Juni 2022, yang mana Presiden Joko Widodo bertemu secara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan ini merupakan upaya pertama diplomasi Indonesia secara langsung dalam merespon konflik Rusia – Ukraina, dan juga menandakan bahwa Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mengunjungi Ukraina (Katriana, 2022). Pada pertemuan diplomatik ini, Presiden Joko Widodo meyakinkan Presiden Zelensky bahwa kunjungan tersebut merupakan murni dorongan aspirasi dan dukungan masyarakat Indonesia ke Ukraina, serta menginginkan perdamaian antar kedua negara. Melihat motivasi tersebut, Presiden Zelensky merespon positif dengan mengatakan bahwa sangat menghargai dukungan dari Indonesia dalam mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan Ukraina (Katriana, 2022).

Tahap selanjutnya dari kunjungan misi perdamaian Indonesia ke Ukraina yaitu menguatkan dan membentuk kerja sama bilateral. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa tepat pada bulan Juni ini, merupakan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Ukraina (Katriana, 2022). Oleh sebab itu, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama bilateral yang telah ada sebelumnya. Mengingat pada tahun 2020 silam, Indonesia dan Ukraina telah sepakat meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, intelijen, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Pada saat itu juga disahkan perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Ukraina (Kementerian Luar Negeri RI, 2022b). Berlandaskan hubungan yang kooperatif tersebut, pada kunjungan Presiden Joko Widodo pada Juni 2022, terus berupaya membangun komunikasi yang kooperatif, sehingga menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan Ukraina di bidang visa (Asmara, 2022). Indonesia dalam momen ini juga memberikan berbagai bantuan terhadap Ukraina. Bantuan dari Indonesia berupa pemberian obat-obatan dan bantuan pembangunan rumah sakit di Kyiv, Ukraina. Selain itu, kedua negara membahas mengenai potensi kerja sama rekonstruksi pasca perang di Ukraina (Asmara, 2022).

Merespon kondisi konflik Rusia – Ukraina yang memanas dan belum usai, Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia sebagai negosiator antara Rusia dan Ukraina, yang mana bertujuan untuk mendapatkan titik terang perdamaian antar kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun susah diraih, akan tetapi semangat perdamaian harus terus dilontarkan dan diperjuangkan (Katriana, 2022). Peran mediator Indonesia dalam konflik ini terlihat dari bersedianya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk meneruskan pesan dari Presiden Zelensky, yang mana diharapkan dapat mencapai titik kesepakatan damai. Indonesia mengirimkan pesan Ukraina terhadap Rusia, terutama mengenai dibukanya jalur *supply chain* termasuk ekspor impor makanan dan gandum, yang mana tidak hanya mempengaruhi kedua negara saja tetapi juga dunia internasional (Asmara, 2022).

Diplomasi dan negosiasi Indonesia ke Ukraina tidak hanya sampai disitu saja, Indonesia juga mengundang Ukraina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia. Agenda tersebut menjadi ajang untuk pemulihan ekonomi global, serta diharapkan menjadi upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas global. Indonesia melalui Presiden Joko

Widodo mengundang Presiden Zelensky untuk hadir di KTT G20, yang mana juga akan dihadiri oleh Rusia, sehingga pada agenda tersebut kedua negara dapat saling berdialog dan negosiasi secara langsung, dengan dipandu oleh negara-negara G20. Langkah ini merupakan salah satu upaya nyata dari Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan perdamaian konflik Rusia – Ukraina. Merespon undangan tersebut, Presiden Zelensky mengatakan bahwa berterima kasih atas undangan yang diberikan untuk ikut dalam KTT G20, akan tetapi Ukraina dapat memastikan hadir tergantung pada situasi dan kondisi keamanan di Ukraina. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk kedua negara dapat bertemu di KTT G20, yang mana Presiden Zelensky mengatakan bahwa adanya agenda tersebut dapat menguatkan upaya dalam mengakhiri perang (Katriana, 2022).

### **Kunjungan Diplomatik Indonesia ke Rusia**

Pada awal terjadinya konflik Rusia-Ukraina, respon pertama Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri adalah dengan mengutuk aksi penyerangan tersebut dengan tanpa menyebutkan bahwa Rusia sebagai pihak agresor. Indonesia sendiri menghimbau Rusia dan juga Ukraina agar segera menyelesaikan konflik tersebut dalam jangka waktu yang dekat dan melalui jalur damai. Melalui pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo juga menyerukan bahwa konflik yang terjadi dapat menghambat proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi (Storey & Choong, 2022). Bentuk dari pernyataan resmi oleh kepala negara dan kementerian luar negeri tersebut merupakan langkah awal Indonesia untuk melakukan komunikasi terhadap pihak yang bertikai, terutama Rusia.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggapi terjadinya konflik tersebut dengan menyatakan yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia adalah kenaikan harga pangan yang dapat membahayakan banyak negara, terutama bagi negara berkembang (Buddhavarapu, 2022). Dalam melakukan kunjungan diplomatik ke Rusia, terdapat dua tujuan penting yang dibawa oleh Indonesia yakni 1) untuk melakukan persuasi kepada Presiden Vladimir Putin guna membuka rute suplai ekspor gandum Ukraina di tengah berjalannya konflik, dan 2) Mengundang Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada November mendatang (Strangio, 2022). Pencapaian akan kedua tujuan tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional, sembari memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pada 30 Juni 2022, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vladimir Putin untuk membahas tentang isu perdamaian dan kemanusiaan terkait konflik Rusia-Ukraina, sembari mengutarakan dua tujuan penting sebelumnya. Indonesia menegaskan pesan serta perhatiannya terhadap konflik yang menyebabkan krisis keamanan dan juga humanitarian, sekaligus menjadi mediator bagi kedua negara untuk mencapai perdamaian. Kemudian Indonesia juga ‘membujuk’ Rusia agar kembali menghidupkan semangat perdamaian dan multilateralisme, terutama dalam hal untuk memperbaiki rantai pasok pangan dunia yang telah terdisrupsi akibat dari perang (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a).

Sebagai luaran dari pertemuan tersebut, Presiden Vladimir Putin bersepakat untuk membuka jalur ekspor gandum Ukraina dan juga memberikan jaminan suplai terhadap komoditas pupuk Rusia dalam upaya untuk reintegrasi kedua komoditi tersebut ke dalam rantai pasok global (Kementerian Luar Negeri RI, 2022a). Ia juga mengkonfirmasi kehadiran Rusia pada KTT G20 mendatang, walaupun belum dapat dikonfirmasi kehadirannya secara personal atau melalui komunikasi daring (Teslova, 2022). Selain itu Rusia juga menawarkan kerja sama di bidang pembangunan transportasi kereta api dan juga energi nuklir untuk Ibukota Nusantara (IKN) di masa mendatang (Ho, 2022). Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwasanya kunjungan Presiden Indonesia ke Rusia merupakan bentuk dari pemenuhan kepentingan domestik,

terlepas klaim yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tertentu dibalik kunjungan tersebut.

### **Misi Perdamaian Indonesia Pada Krisis Rusia – Ukraina sebagai Upaya Pembentukan *Soft Power***

Dibalik narasi perdamaian dunia yang dilontarkan oleh Indonesia terkait Konflik Rusia - Ukraina, terdapat kepentingan nasional dibaliknya. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia tidak bertindak semata-mata berdasarkan idealisme perdamaian dunia saja, tetapi juga adanya kebutuhan nasional yang terganggu karena adanya Konflik Rusia - Ukraina yang berdampak negatif di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia melakukan misi perdamaian dunia tidak hanya karena memperjuangkan kepentingan bersama (*common interest*) tetapi juga kepentingan nasional yang terdiri dari kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan, menurunkan tensi negara - negara Barat, mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia, dan membentuk *soft power* Indonesia itu sendiri di mata dunia.

Pertama, kepentingan akan menstabilkan krisis energi dan pangan. Salah satu efek yang paling berpengaruh signifikan dari adanya konflik tersebut adalah terjadinya krisis energi dan pangan secara global yang berdampak kepada berbagai negara, terutama negara berkembang. Dalam bidang energi, dunia merasakan dampak yang sama dikarenakan melambungnya harga energi fosil (minyak bumi, gas alam, dll.) yang sangat tinggi dan fluktuatif sebagai akibat dari terganggunya proses *supply chain* kepada pasar energi global. Rusia sebagai pelopor eksportir gas alam dan sekaligus penghasil komoditas minyak terbesar kedua di dunia dijatuhi berbagai sanksi dan embargo ekonomi sehingga tidak dapat melakukan distribusi optimal akan komoditas tersebut. Adanya krisis energi yang berkepanjangan juga dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan diantara negara-negara untuk mendapatkan akses terhadap sumber energi (UN Global Crisis Group, 2022).

Hal tersebut juga berlaku dalam bidang pangan dimana Rusia dan Ukraina merupakan pemasok komoditas gandum terbesar dan juga negara pertama menjadi eksportir pupuk yang signifikan bagi proses agrikultural global. Adanya konflik tersebut membuat kedua negara tidak dapat menyalurkan komoditas tersebut ke dalam *supply chain* global sehingga membuat negara-negara yang memiliki ketahanan pangan yang rendah menjadi kian rentan. Terlebih konflik ini juga mencegah dan menghambat adanya proses budidaya gandum di Ukraina pada musim semi dan proses panen pada musim dingin, dan kegagalan proses tersebut akan membuat suplai gandum kepada pasar internasional menjadi tidak optimal. Ketidakmampuan penyaluran distribusi komoditas dari kedua negara yang dianggap sebagai ‘keranjang roti dunia’ tersebut juga berdampak pada membesarnya potensi kelaparan global menjadi 323 juta orang mengalami insekuritas pangan di tahun 2022 (Quader, 2003; Ben Hassen & El Bilali, 2022).

Krisis energi dan pangan global tersebut juga berimbas pada tataran domestik Indonesia yang mengalami kenaikan harga bahan bakar dan juga pangan. Di bidang energi, Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada proses impor terhadap suplai minyak domestik sehingga berdampak kepada kenaikan harga bahan bakar sebagai akibat dari kenaikan tren global. Namun secara umum suplai bahan bakar Indonesia dapat dikategorikan aman karena tidak melakukan impor langsung dari Rusia (Wicaksana et al., 2022). Di bidang pangan, kenaikan harga gandum juga memicu fluktuasi harga beberapa komoditas pangan pokok seperti roti, mie, dan bahan dasar tepung terigu. Semenjak terjadinya konflik, harga gandum global meningkat sebesar 5.34% menjadi Rp.141.373 per gantang dan merupakan kenaikan terbesar semenjak terakhir pada Krisis Ekonomi 2008 (Hanifah, 2022).

Kenaikan komoditi energi dan pangan diatas membuat Indonesia melakukan penyesuaian arah kebijakan luar negeri dengan melakukan Misi Perdamaian tersebut. Maka dari itu, dengan adanya ancaman energi dan pangan terhadap kondisi domestik membuat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev dan Moskow menandakan bahwa Indonesia memiliki ‘kepentingan’ agar *global supply chain* kembali pulih. Hal tersebut menjadi penting



untuk membuat keadaan dalam negeri Indonesia kembali menjadi stabil dan menguat. Gestur akan lobi kepentingan tersebut terlihat dalam pernyataan berikut:

*“Ini menjadi penting bagi seluruh pihak untuk menyediakan jaminan keamanan demi kelancaran ekspor komoditas pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan. Saya mendukung PBB dalam hal ini”* – Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kiev ([Kementerian Luar Negeri RI, 2022a](#)).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Misi Perdamaian Dunia menjadi penting bagi Indonesia agar dapat mengamankan ketersediaan energi dan pangan agar dapat memenuhi kepentingan nasional sekaligus kepentingan masyarakat. Dari sisi dalam negeri, gestur tersebut menjadi penting dikarenakan kestabilan energi dan pangan (yang merupakan fundamental bagi keberlangsungan negara) dapat menjadi faktor kunci agar pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap berjalan dan menghindari demonstrasi dari masyarakat ([Kementerian Luar Negeri RI, 2022a](#)). Sedangkan dari sisi kebijakan luar negeri, hal ini menjadi penting untuk menunjukkan sikap dan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang dapat berkontribusi terhadap kestabilan *global supply chain*, disamping juga berniat untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Maka dari itu, apa yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dengan menjadikan sektor luar negeri sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kedua, adanya kepentingan menurunkan tensi negara - negara Barat. Akibat krisis Rusia – Ukraina yang tengah berlangsung ini membuat Indonesia berada pada posisi yang sulit. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan tuan rumah dari KTT G20 nanti menjadi polemik yang rumit dikarenakan harus menemui dilema. Terdapat tekanan dan boikot yang mungkin dan bahkan akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan sanksi kepada Rusia dengan tetap memperbolehkan hadir pada KTT tersebut. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan lobi kepada negara – negara barat. Hal ini diperlukan mengingat akan mengancam keberlangsungan G20 secara kolektif ([BBC News Indonesia, 2022](#)).

Forum G20 berpotensi menjadi dua blok yaitu blok AS dan Sekutu yang memberikan dukungan terhadap Ukraina, dan blok Tiongkok dan Brazil yang memberikan dukungan terhadap Rusia. Amerika Serikat dan Sekutunya meminta dan mendesak Indonesia agar tidak mengundang Rusia dalam pertemuan G20 di Bali. Dilain sisi Tiongkok dan Brazil tidak setuju jika Rusia tidak dilibatkan sebagai bagian dari kesatuan G20. Hal tersebut tentunya memberikan tekanan kepada Indonesia dimana pemimpin – pemimpin negara anggota banyak yang memberikan ancaman boikot terhadap pelaksanaan G20 mendatang. Indonesia sejauh ini belum mengambil sikap dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Hal tersebut didasari oleh belum adanya instruksi dan ketetapan resmi dari Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB). Indonesia memegang prinsip integritas dan menghormati hukum internasional karena sampai tulisan ini dibuat belum terdapat ketetapan sanksi resmi dari PBB ([FISIP UI, 2022](#)).

Menanggapi hal tersebut Indonesia akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia akan terus membangun komunikasi antara negara – negara anggota G20 dengan harapan seluruh anggota dapat menghadiri kegiatan tersebut. Hal tersebut tentunya ditujukan untuk memberikan perspektif Indonesia sebagai presidensi secara komprehensif kepada negara – negara barat yang anti Rusia. Kunjungan akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan membawa agenda isu terkini termasuk G20 dan upaya dalam menurunkan ketegangan Rusia – Ukraina ([BBC News Indonesia, 2022](#)).

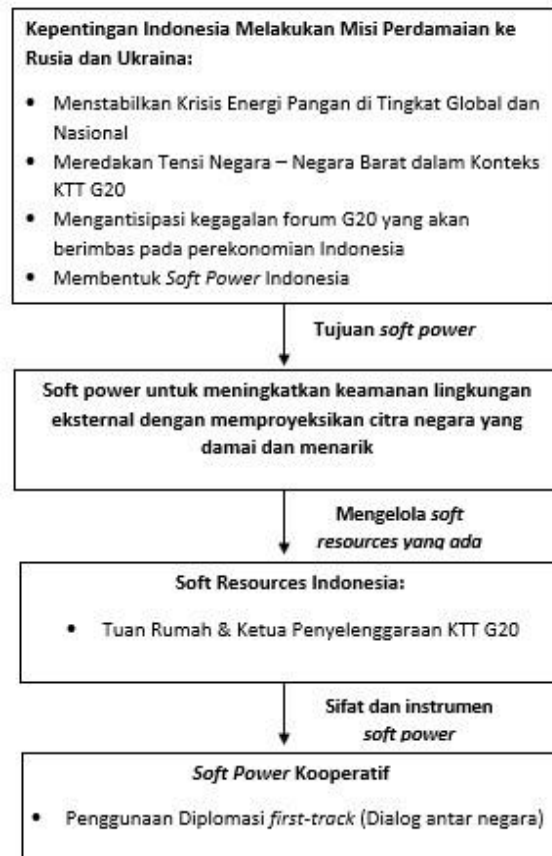
Ketiga, kepentingan mensukseskan berjalannya KTT G20 di Indonesia. Ketegangan yang berlangsung diantara negara – negara barat anggota G20 adalah bukan hal yang menguntungkan bagi Indonesia. Jika benar nantinya Indonesia akan diboikot oleh mayoritas negara barat dalam konteks ini Amerika Serikat dan Sekutu, maka kecil kemungkinan pilar presidensi G20 akan terealisasi secara maksimal. Momen ini merupakan hal yang sangat krusial

bagi Indonesia. Dikarenakan pada agenda yang akan berlangsung dalam KTT G20 memuat sejumlah rancangan strategi ekonomi.

Terdapat setidaknya enam agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia. Secara berurut; 1) *Exit Strategy to Support Recovery*, yaitu sebuah agenda yang diperuntukkan untuk membahas peran G20 dalam melindungi negara - negara berkembang yang berusaha bangkit menuju pemulihan ekonomi; 2) *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*, pada agenda ini pembahasan difokuskan pada upaya dalam mengatasi dampak jangka panjang (*scarring effect*) krisis dengan cara meningkatkan produktivitas, ketenagakerjaan, *household*, korporasi, dan finansial; 3) *Payment System in Digital Era*, agenda pembahasan seputar penetapan standar pembayaran lintas batas negara serta pembahasan komprehensif terkait pengembangan CBDC (*Central Bank Digital Currency*); 4) *Sustainable Finance*, bertujuan dalam membahas isu resiko iklim dalam konteks resiko transisi menuju ekonomi berbasis lingkungan; 5) *Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance*, pembahasan pada agenda ini akan tertuju pada ide pemanfaatan open banking dalam upaya mendorong produktivitas, ekonomi, serta keuangan. 6) *International Taxation*, agenda ini secara khusus akan membahas perpajakan internasional dalam implementasi *Framework* bersama OECD ([BBC News Indonesia, 2022](#)).

Keenam agenda prioritas tersebut diperuntukkan dalam memperkuat lingkungan kemitraan; mendorong produktivitas; Meningkatkan ketahanan dan stabilitas; Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif; serta Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat ([Bank Indonesia, 2022](#)). Jika pertemuan dalam forum ini gagal akibat krisis Rusia – Ukraina yang semakin memburuk maka poin – poin yang telah disebutkan akan tidak terwujud dan akan membawa kerugian yang besar bagi Indonesia, kawasan regional, dan negara – negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga upaya peran diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia maupun Ukraina adalah sebuah langkah dalam mengantisipasi dan mencegah agar kemungkinan terburuk tidak terjadi.

Kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian mengarah kepada pembentukan *soft power* Indonesia itu sendiri di mata dunia. Misi perdamaian Rusia - Ukraina yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya Indonesia dalam menjadi *attractive*/menarik di mata dunia, karena dapat menjadi negara yang berani menekan Rusia dan Ukraina untuk dapat berdamai melalui dialog. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1 Alasan Indonesia Melakukan Misi Perdamaian ke Rusia dan Ukraina dalam Soft Power (Diolah oleh Penulis, 2022)**

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa misi perdamaian Indonesia meskipun memiliki berbagai kepentingan, namun tetap akan mengarah terhadap pembentukan *soft power*. Hal ini karena, Indonesia memiliki *soft resources*, sehingga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia jika menunjukkan aksi perdamaian. Dalam mencapai berbagai kepentingan dan tujuan tersebut, Indonesia menggunakan instrumen diplomasi *first-track* yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Guna memahami lebih lanjut, penjelasan detail mengenai *soft power* Indonesia akan dijelaskan setelah penjelasan kepentingan nasional Indonesia lainnya pada bab selanjutnya.

Melihat pada Gambar 1, menerapkan lebih lanjut mengenai Teori *Soft Power* dari Geun Lee (2009) yaitu misi perdamaian Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan lingkungan eksternal dengan memproyeksikan citra negara yang damai dan menarik. Hal ini menjadi tepat, karena Indonesia memperjuangkan perdamaian Rusia - Ukraina yang akan mengembalikan stabilitas keamanan global, dan di sisi lain Indonesia juga memperjuangkan terbentuknya citra positif Indonesia sebagai negara cinta perdamaian dan menarik perhatian negara-negara lainnya untuk dapat segera mengakhiri Perang Rusia - Ukraina.

Dalam mencapai tujuan *soft power* tersebut, diperlukannya *soft resources* yang mana akan dikelola menjadi senjata yang dapat mempengaruhi negara-negara lain. Indonesia memiliki *soft resources* yaitu status sebagai tuan rumah dan ketua (Presidensi) penyelenggaraan KTT G20. Status tersebut menjadi berpengaruh kuat karena KTT G20 merupakan agenda yang penting, karena menjadi wadah dari negara-negara untuk bekerjasama menghadapi krisis dan memulihkan perekonomian global pada saat ini. Komitmen Indonesia dalam memulihkan perekonomian global yang dilanda krisis dapat dilihat dari tema KTT G20 itu sendiri yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*". KTT G20 sebagai *soft resources* Indonesia juga didukung dengan status G20 itu sendiri yang mana merupakan sebuah grup

**Dinda Tulus Tiara, Syasya Yuania Fadila Mas'udi:**

Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power

informal yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa serta perwakilan dari IMF dan World Bank. G20 dapat dikatakan sebagai forum ekonomi utama dunia yang memiliki signifikansi yang strategis. Hal tersebut mengingat G20 memiliki pengaruh secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan sekitar 85% perekonomian dunia (Mantong & Kembara, 2022). Oleh karena itu, status Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 tidak dapat dipandang remeh oleh negara-negara lain, sehingga menjadi suatu *soft resources* yang patut dipertimbangkan.

Menganalisis lebih lanjut, pada Gambar 1, Indonesia mengelola *soft resources* tersebut menjadi kebijakan luar negeri yang bersifat kooperatif yang berarti Indonesia mengedepankan langkah-langkah *soft*, damai, dan tidak memancing peningkatan tensi kedua negara yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan instrumen diplomasi dalam misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina, yang mana berupaya menjadi jembatan komunikasi antar kedua negara tersebut. Tidak ada perbedaan dalam diplomasi Indonesia ke Rusia dan Ukraina, Indonesia tetap menjaga posisinya sebagai negara pihak ketiga yang netral dan berperan sebagai *mediator*. Hal tersebut sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang dianut oleh Indonesia. Oleh sebab itu, adanya misi perdamaian yang bersifat kooperatif dan menggunakan diplomasi, menjadi cara Indonesia dalam mengupayakan perdamaian Rusia - Ukraina dan mendapatkan citra positif di mata dunia.

## SIMPULAN

Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Ukraina dan Rusia, menggunakan instrumen diplomasi yang mana memiliki tujuan untuk meredakan konflik dan mencapai perdamaian. Upaya Indonesia tersebut juga diselingi oleh pembentukan *soft power* Indonesia itu sendiri seperti membangun citra positif, menyambut KTT G20, dan kepentingan ekonomi. Meskipun terdapat kepentingan nasional bagi Indonesia, namun hal tersebut tidak melunturkan kepentingan global yang dibawa Indonesia seperti pemulihan ekonomi global, dan *supply chain*. Keberanian Indonesia dalam politik internasional ini berbeda dengan negara-negara lainnya, dikarenakan Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia menggunakan instrumen *Soft Power*-nya yang berupa *First Track Diplomacy* sebagai sebuah upaya dalam mengawal dialog damai antara kedua negara. Sehingga Indonesia dapat menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan yang dibawanya. Walaupun dapat digaribawahi fokus Indonesia adalah isu kemanusiaan dimana isu tersebut kemudian beririsan dengan isu ekonomi sehingga didalamnya terkandung unsur - unsur agenda ekonomi baik secara domestik, regional, maupun internasional. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memanfaatkan *Soft Resource* yang dimilikinya dan menjamin keberlangsungan agenda internasional yang melibatkan negara yang sedang berkonflik dan negara - negara lain pada konteks KTT/G20.

## DAFTAR PUSTAKA

Asmara, C. G. (2022, Juni 30). *Simak! Ini Dia Hasil Lengkap Pertemuan Jokowi-Zelensky*.

Retrieved from CNBC Indonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220630091735-4-351669/simak-ini-dia-hasil-lengkap-pertemuan-jokowi-zelensky>

Bank Indonesia. (2022). *Presidensi G20 Indonesia 2022*. Bank Indonesia.

BBC News Indonesia. (2022). *G20: Negara Barat ancam boikot KTT G20, upaya lobi Indonesia "diragukan berhasil" dan diminta "tetap netral."* BBC News Indonesia.

- Ben Hassen, T., & El Bilali, H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? *Foods*, 11(15), 2301. <https://doi.org/10.3390/foods11152301>
- Bercovitch, J., & Langley, J. (1993). The Nature of the Dispute and the Effectiveness of International Mediation. *The Journal of Conflict Resolution*, 37(4), 670–691. <http://www.jstor.org/stable/174545>
- Buddhavarapu, R. (2022). *Jokowi says rising food prices are dangerous and put developing nations like Indonesia at risk*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2022/06/20/jokowi-food-inflation-is-dangerous-for-developing-nations-like-indonesia.html>
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua (Ed. 1, cet. 5 ed.)*. Jakarta: Kencana.
- CNN Indonesia. (2022). *Jokowi Temui Zelensky , Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Ukraina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220629143655-134-815028/jokowi-temui-zelensky-bawa-bantuan-kemanusiaan-untuk-ukraina>
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace (3rd ed.)*. Kumarian Press Book.
- Fadel, M. (2022). *Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina*. Sekretariat Jenderal MPR RI. <https://www.mpr.go.id/berita/Menelisik-Peluang-Keberhasilan-Jokowi-Mendamaikan-Rusia-dan-Ukraina>
- Falahi, Z. (2022). The Ukraine Crisis: An Offer of Conflict Resolution and Its Impact on Global Economy. *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, 7–12.
- FISIP UI. (2022). *Dosen Hubungan Internasional Dalam Diskusi Publik Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Presidensi G20 di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hanifah, S. (2022). *Invasi Rusia ke Ukraina Bisa Membuat Pecinta Mi Sengsara, Harus Bagaimana?* Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/invasi-rusia-ke-ukraina-bisa-membuat-pecinta-mi-sengsara-harus-bagaimana>
- Pebrianto, F. (2022). *Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Guru Besar UI: RI Tak Punya Kekuatan Memaksa Damai*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1606110/jokowi-ke-rusia-dan-ukraina-guru-besar-ui-ri-tak-punya-kekuatan-memaksa-damai>
- Ho, Y. (2022). *Putin Offers Russian Railways Investment in New Indonesia Capital*. Bloomberg Asia. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/putin-offers-russia-railways-investment-in-new-indonesia-capital>
- Humas Kemensetneg. (2022). *Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Perang Rusia-Ukraina dengan Sejumlah Pemimpin Negara*. Kementerian Sekretariat Negara. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-bahas-solusi-damai-perang-rusia-ukraina-dengan-sejumlah-pemimpin-negara/>
- Katriana. (2022, Juli 3). *Indonesian peace mission on Russia-Ukraine conflict*. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-07-03/indonesian-peace-mission-on-russia-ukraine-conflict>

- Kementerian Luar Negeri RI. (2022a). *Bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3756/berita/bertemu-dengan-presiden-putin-presiden-jokowi-indonesia-siap-menjembatani-komunikasi-rusia-ukraina>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022b). *President Jokowi: The Visit to Ukraine Shows Indonesia's Concern for Ukraine*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/3752/berita/president-jokowi-the-visit-to-ukraine-shows-indonesias-concern-for-ukraine>
- Lee, G. (2009, June). A Theory of Soft Power and Korea's Soft Power Strategy. *Korean Journal of Defense Analysis*, 2(2), 205-218. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10163270902913962>
- Mankoff, J. (2022). Russia's War in Ukraine: Identity, History, and Conflict. In *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* (Issue May). <https://www.jstor.org/stable/resrep40567>
- Mantong, A. W., & Kembara, G. (2022). *Indonesia's G20 Presidency and the War in Ukraine*. Retrieved from Istituto Affari Internazionali: <https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indonesias-g20-presidency-and-war-ukraine>
- Mapendere, J. (2016). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks. *Culture of Peace Online Journal*, 2(1), 66–81. [https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy\\_Mapendere.pdf](https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_Mapendere.pdf)
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mbah, R. E., & Wasum, D. (2022). Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(3), 144–153. <https://doi.org/10.14738/assrj.93.12005>
- Moerdijat, L. (2022). *Kedepankan Pertimbangan Kemanusiaan untuk Upayakan Perdamaian pada Krisis Rusia-Ukraina*. Sekretariat Jenderal MPR RI. <https://www.mpr.go.id/berita/Kedepankan-Pertimbangan-Kemanusiaan-untuk-Upayakan-Perdamaian-pada-Krisis-Rusia-Ukraina>
- Nagy, S., & Kim, P. (2022). *Ukraine-Russia War : A prelude to a post-Western international order ?*. <https://isdpr.eu/publication/ukraine-russia-war-a-prelude-to-a-post-western-international-order/>
- Nucterlain, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266. <https://www.jstor.org/stable/20096778>
- Primadhyta, S. (2022). *Harga Pupuk NPK Diprediksi Naik Imbas Perang Rusia-Ukraina*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220314165503-92-771047/harga-pupuk-npk-diprediksi-naik-imbis-perang-rusia-ukraina>
- Junaedi, J. (2022). The Impact of the Russia-Ukraine War on the Indonesian Economy. *Journal of Social Commerce*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.56209/jommerce.v2i2.29>

- Quader, A. K. M. A. (2003). Natural gas and the fertilizer industry. *Energy for Sustainable Development*, 7(2), 40–48. [https://doi.org/10.1016/S0973-0826\(08\)60353-1](https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60353-1)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Presiden Jokowi: Kunjungan ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia untuk Ukraina*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>
- Stanzel, V. (2018). New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century. *Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research Paper 11*. <https://www.swp-berlin.org/en/publication/new-realities-in-foreign-affairs-diplomacy-in-the-21st-century>
- Strangio, S. (2022). *Indonesia's President Jokowi to Visit Russia, Ukraine: Report*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2022/06/indonesias-president-jokowi-to-visit-russia-ukraine-report/>
- Storey, I., & Choong, W. (2022). Russia's Invasion of Ukraine : Southeast Asian Responses and Why the Conflict Matters to the Region. In *Perspective ISEAS Yusof Ishak Institute* (Issue 24). [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/02/ISEAS\\_Perspective\\_2022\\_24.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/02/ISEAS_Perspective_2022_24.pdf)
- Sweijts, T., & Bertolini, M. (2022). *How Wars End War Terminations: Insights for the Russia-Ukraine War* (Issue 1). <https://hcss.nl/wp-content/uploads/2022/05/How-Wars-End-HCSS-2022.pdf>
- Teslova, E. (2022). *Putin accepts invitation to G20 summit in Indonesia*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/world/putin-accepts-invitation-to-g20-summit-in-indonesia/2624145>
- UN Global Crisis Group. (2022). *Global impact of war in Ukraine: Energy crisis* (Issue 3). <https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-energy-crisis>
- Wibowo, E. A. (2022). *Jokowi ke Rusia dan Ukraina , Guru Besar UI : RI Miliki Kekuatan Moral Hentikan Perang*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1606431/jokowi-ke-rusia-dan-ukraina-guru-besar-ui-ri-miliki-kekuatan-moral-hentikan-perang>
- Wehrenfennig, D. (2008). Multi-Track Diplomacy and Human Security. *Human Security Journal*, 7(Summer), 80–89. [https://www.researchgate.net/publication/296668093\\_Multi-Track\\_Diplomacy\\_and\\_Human\\_Security](https://www.researchgate.net/publication/296668093_Multi-Track_Diplomacy_and_Human_Security)
- Wicaksana, K. S., Ramadhan, R. F., Sujaka, M. 'Azza, & Prasajo, A. S. A. ayubi. (2022). The Effect of the Russia-Ukraine Crisis on Price Fluctuations and Trade in Energy Sector in Indonesia. *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom*, 4(1), 6–18. <https://doi.org/10.37525/mz/2022-1/345>